

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DALAM KEUANGAN SYARIAH

Ulfatul khoiriyah – Renny Oktafia

Perbankan syariah

Fakultas agama islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract

Community empowerment shows the actualization of Islamic values through strengthening in the sector and the scope of society. In the development of the regional economic sector is very important in every region in Indonesia. Sharia economics that exist in Indonesia at this time experiencing significant development. However, the development is not balanced with human resources. Referred to as human resources is one of the problems faced by Islamic financial institutions. To overcome these problems the government needs to connect with Sharia micro finance institutions namely Baitul maal wattamwil (BMT).

Keywords: empowerment, community, Islamic values, human resources, government, BMT

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menunjukkan aktualisasi yang terdapat dari nilai-nilai islam yang melalui penguatan dalam sektor dan lingkup masyarakat. Dalam pengembangan sektor ekonomi daerah sangatlah penting dalam setiap daerah yang ada diindonesia. Ekonomi syariah yang ada di Indonesia pada sekarang ini mengalami perkembangan cukup signifikan. Namun, perkembangan tersebut tidak seimbang dengan sumber daya insani. Yang dimaksud sumber daya insani yaitu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu menghubungkan dengan lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul maal wattamwil (BMT).

Kata Kunci : pemberdayaan, masyarakat, nilai-nilai islam, sumber daya insani, pemerintah, BMT

PENDAHULUAN

Dalam lembaga keuangan syariah untuk menghadapi persaingan global, ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi. Diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau sumber daya insani yang ada di Indonesia. Indonesia

masih kekurangan dan membutuhkan lebih banyak sumber daya insani yang terampil dan mempunyai keahlian yang baik.¹

Kondisi ini tidak dapat dirasakan dan tidak dapat bertahan pada tahun 90-an, yaitu dengan adanya krisis keuangan global, yang lebih dikenal dengan istilah krisis moneter, yang berdampak langsung dalam perekonomian Indonesia antara lain: nilai tukar rupiah mengalami penurunan, peningkatan harga-harga barang.

Kondisi perekonomian pada masa itu diperparah karena munculnya eskalasi politik Negara yang tidak stabil, sehingga akan berdampak pada krisis sosial yang cukup parah diantaranya: terdapat kerusuhan di beberapa tempat, penjarahan mulai banyak penghuninya dan berbagai tindakan anarkis lainnya.

Persebaran dari masyarakat miskin yang merupakan lemah adalah sebagian besar dari kelompok masyarakat pedesaan antara lain: petani, nelayan peternak, sebagian yang berada didaerah perkotaan adalah para buruh, pedagang kaki lima, korban bencana alam, pengangguran, korban PHK, dll. Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bentuk pemberdayaan yang tepat pada sasaran yang diperlukan, perlu difikirkan siapa yang tepat menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, dan juga harus memiliki daya untuk membangun.

Islam memandang keberdayaan atas masyarakat sebagai suatu hal yang sangat penting sehingga pembedayaan dalam pandangan islam memiliki suatu pendekatan yang holistik dan strategis. Yang berkaitan dengan hal itu, islam memiliki paradigm strategis dan holistik dalam memandang pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam jurnal pengembangan masyarakat islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam di Indonesia merupakan sebuah pembelajaran yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dalam melakukan upaya perbaikan kualitas kehidupan baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan didunia maupun di akhirat.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, sedangkan menurut istilah pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya

¹ Sebagaimana disampaikan oleh Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia) pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012 bahwa terdapat gap SDI dengan kebutuhan mencapai 20.000 orang

serta berupaya untuk mengembangkannya.² Pengertian pemberdayaan menurut salah satu para ahli yang bernama Gunawan Sumasiningrat pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.³

Memberdayakan masyarakat yaitu dengan cara mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan yang sangat kuat diberbagai bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan diharapkan untuk dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka, dalam pengelolaan potensi sumber daya yang ada di daerah pedesaan secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk kelangsungan hidup agar terjamin mulai saat ini sampai masa generasi yang akan datang.

Aktualisasi nilai islam dalam pemberdayaan masyarakat, menurut pendapat Istiqomah (2008, h.67-68) dalam jurnalnya menjelaskan tentang cara pengembangan masyarakat islam dalam memberdayakan umat antara lain sebagai berikut:

1. Upaya pemberdayaan masyarakat dilihat dari segi peletakan dari sebuah tatanan sosial dimana manusia bertindak secara adil dan terbuka dan dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang mampu maupun yang tidak mampu.
3. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan mereka secara mandiri.

Strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, kita memerlukan suatu strategi untuk kebijakan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pada dasarnya strategi mempunyai tiga arah antara lain:

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.

² Mubyanto, *membangun sistem ekonomi*, Cet.I, Yogyakarta, BPFE, 2000, H. 263

³ Gunawan Sumadiningrat, *pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial*, Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 1999, Cet.I, h.66

2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam melakukan pengelolaan pembangunan di daerah dimana daerah tersebut mengembangkan peran serta masyarakat.
3. Pemantapan arah perubahan struktur social ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran masyarakat local.⁴

Dalam pengertian diatas dikategorikan kedalamnya yakni Bitul Maal Wattamwil, koperasi syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

1. Baitul Maal Wattamwil

Secara etimologi diambil dari kata *al-maal* dan *at-tamwil*. *Al-maal* yang berarti harta benda, sedangkan kata *at-tamwil* berarti prtumbuhan harta dan sama-sama bersal dari asal kata *maal*.⁵ Pengertian Baitul maal diambil dari kata *bait* yang berarti rumah, dan *al-maal* berarti harta benda. Jadi Baitul maal berarti ruah sebagai tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Menurut istilah Baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yakni menangani segala harta masyarakat, baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran Negara, seperti: zakat infak, shodaqoh dan wakaf. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat daerah pedesaan dengan berlandaskan syariah.

Baitul Maal Wattamwil telah menerapkan nilai-nilai syariah yang diantaranya seperti pelarangan unsur riba, yang dijelaskan dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 161;⁶

artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan mereka memakan harta benda dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka siksa yang pedih.

2. Koperasi Syariah

⁴ Gunawan Sumodiningrat, *pemberdayaan masyarakat dan jarring pengaman social*, h. 130

⁵ Dr. H. Hamdan, SH., MH, "*Baitulmal wattamwil dan BPR*", Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung - Bogor tanggal 31 Agustus 2012.

⁶ *Ibid*, hal.35.

Secara istilah koperasi diambil dari kata *cooperate* yang berarti kerjasama,⁷ kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dan penjelasan kata koperasi adalah sebagai suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang beranggotakan pada umumnya yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.⁸

Dengan banyaknya koperasi berlabel syariah, diharapkan akan dapat terus membantu perekonomian terutama pada masyarakat kecil di pedesaan yang banyak terjebak dalam praktek rentenir, dan juga lebih menentramkan bagi mereka yang sudah menjadi anggota koperasi.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Istilah dari Bank Perkreditan Rakyat dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia tahun 1977 akhir, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan lain-lain.

Didirikannya BPRS yang berlatar belakang sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian di Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Dari sisi lain BPRS dapat bertindak sebagai lembaga BMT yang bertugas menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibbah atau dana social yang lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan yang lain.

Ekonomi masyarakat di daerah pedesaan cukup dengan berbagai usaha antara lain: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha milik perorangan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilaukan oleh perorangan atau bukan badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar pun telah memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan yang usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang

⁷ Sukrawardi K. Lubis, 2000, **Hukum Ekonomi Islam**, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 122

⁸ G. Karta Saputra, *et., el.*, 1985, **Koperasi Indonesia**, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 115

perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari hasil penjualan tahunan.

Lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, LMKS keberadaannya cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat senantiasa terus dipelihara sehingga akan menjadi alternative yang paling baik dalam memecahkan suatu masalah. Pemberdayaan ini melalui dengan memanfaatkan produk layanan dan jasa yang ada di LMKS, yang diawali dengan bersosialisasi di berbagai media. Salah satu langkah sosialisasi ini mengingat keberadaan LKMS yang bersegmentasi di masyarakat. Diperlukan kerja keras dalam memajukan LKMS terutama BMT, jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT ini terjadi saat ingin memajukan LKMS kelemahan-kelemahan nya diantaranya sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil yang terlalu besar akan memberatkan mudharib yang mempunyai pendapatan kecil.
2. Margin yang ditentukan tidak diberitahukan kepada mudhorib dahulu.
3. Dilakukan penyitaan secara paksa dalam program penyelesaian sengketa ,
kejaian ini akan terulang lagi bahkan marak pada pola kinerja operasional BMT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan merupakan kumpulan masyarakat muslim yang berupaya bangkit dari ketidakberdayaan melalui berbagai penguatan sektor masyarakat yang mengutamakan pada basis agama islam dan pendidikan

Diperlukan edukasi yang berkesinambungan yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor mikro dan kecil, dengan produk LKMS yang tidak jauh beda dengan produk perbankan syariah, akan menjadi salah satu sisi untuk mengoptimalkan eksistensinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat pedesaan dengan bertambahnya modal dan tempat usaha yang strategis.

Saran

Pihak BMT disarankan untuk memberikan informasi yang cukup jelas, minimnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pembiayaan yang berlandaskan syariat. Perlu meningkatkan kerjasama dan peduli pada semua elemen diantaranya masyarakat, pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya yang ikut serta dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Untuk penulis selanjutnya diharapkan dapat memperkaya karya tulis ini dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam di masyarakat daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Mubyanto. 2000. *Membangun Sistim Ekonomi*. Cet.I, Yogyakarta, BPFE, 2000, H. 263

Sumadiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan jaringan pengamanan sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, Cet.1

Oktafia, Renny. 2014. *Peranan BMT Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly Surabaya*. Vol. 01 number 01, Oktober 2014, diambil dari https://scholar.google.co.id?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=renny+oktavia &oq=renny (24 April 2018).

Jannah, tsarwatul. 2011. *Bank syariah mandiri dalam pemberdayaan masyarakat kota cilegon*. Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah)

Istiqomah, Supriyantini. (2008) **Pemberayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam. Komunitas, jurnal pengembangan masyarakat islam**. (online), Vol. 04, number 01, juni, halaman 65-78. [Internet] Available from: <http://iain.lampung.ac.id/> Komunitas, jurnal pengembangan masyarakat islam. (Accessed: 28 November 2012)